

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi yang telah terjadi di Indonesia telah mengakibatkan perubahan dalam pendekatan pembelajaran di mana metode tatap muka telah diganti dengan pembelajaran daring. Sejak Maret 2020, Surat Edaran Mendikbud No. 4 tahun 2020 menetapkan bahwa kegiatan belajar-mengajar harus dilakukan dari rumah untuk mengurangi persebaran virus COVID-19 di sekolah. Perubahan ini dilakukan guna meminimalisir penyebaran COVID-19 di sekolah sebagai tempat dengan interaksi langsung yang intens. Perubahan kegiatan belajar dari luring menjadi daring. Pada proses peralihan ini tentu butuh waktu banyak untuk memahami proses belajar mana yang efektif dalam penyampaian materi.

Kemendikbud memutuskan untuk menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pada masa pandemi, dilakukan perubahan pada kurikulum, terutama pada strukturnya, beban pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Guru melakukan modifikasi dengan menyederhanakan RPP dan indikator KD untuk memperpendek jumlah kompetensi yang harus dicapai. Meskipun jumlah itu berkurang secara signifikan, tetapi kompetensi yang harus dipenuhi tetap terlaksana karena KD telah dipilih berdasarkan pada hal-hal yang signifikan. Dengan mempertahankan KD yang ada, mengintegrasikan beberapa KD, dan mereformulasi KD, pembelajaran akan mudah dilaksanakan di masa pandemi ini. Selain itu, beban belajar juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu memberatkan siswa dan jumlah mata

pelajaran yang diberikan dibatasi menjadi dua atau tiga mata pelajaran per hari. Meskipun hal tersebut dapat meminimalkan learning loss pada waktu pembelajaran, namun masih banyak anak di Indonesia yang kesulitan memahami bacaan sederhana, sehingga memperburuk krisis belajar yang sudah lama terjadi (Tono,2022).

Era revolusi industri 4.0 menantang dunia pendidikan untuk memiliki inovasi dan kolaborasi yang tinggi agar dapat maju dan berkembang. Tanpa keterampilan inovatif dan kemampuan bekerja sama, lembaga pendidikan akan tertinggal. Namun, pendidikan dan sumber daya manusia yang mampu memajukan dan mengembangkan bangsa harus dapat menjadikan manusia sebagai pembelajar. Untuk menjamin para siswa menguasai keterampilan berpikir reflektif, menyelesaikan masalah secara analitis, berkekrativitas, dan berinovasi serta mampu berkomunikasi dan berkollaborasi, diperlukan pertolongan dalam memperoleh, mengendalikan, serta mengomunikasikan informasi beserta keterampilan mempergunakan teknologi. Kemendikbudristek mencoba mengatasi rintangan dalam proses belajar dengan menggalakkan Kurikulum Merdeka sebagai langkah penyelamat atas problem yang ada. Diharapkan langkah ini dapat membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran.

Sejak Indonesia merdeka hingga kini, sektor pendidikan telah melalui serangkaian transformasi dalam konteks kurikulum. Transformasi tersebut bertujuan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia agar sejajar dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum dijadikan pijakan bagi tenaga kependidikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kurikulum bersifat dinamis dan fleksibel karena sangat tergantung pada perubahan dan kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara serta kemajuan pengetahuan, ilmu dan teknologi, serta seni dan budaya yang terjadi di skala global maupun lokal. Karena itu, kurikulum harus mampu mengikuti perubahan dan kemajuan yang terjadi. Meski begitu, ada pihak yang beranggapan bahwa pergantian menteri seringkali berdampak pada pergantian kurikulum dan buku pelajaran. Sejarah pendidikan di Indonesia menampilkan sejumlah kurikulum yang telah mengalami pergantian, mulai dari Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, hingga kemudian diterapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Kemudian, Kurikulum 2013 diadopsi setelah Kurikulum 2006 dan diikuti oleh Kurikulum Merdeka (Kartika, 2022).

Program Kurikulum Merdeka adalah sebuah solusi dalam memperbaiki sistem pembelajaran. Dalam Kurikulum Merdeka, para pelajar diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang dipelajari sesuai dengan bakat dan minat sendiri, sehingga membuat kurikulum menjadi lebih intrakurikuler dan beragam. Hal ini disebut juga sebagai sebuah kurikulum intrakurikuler yang beragam dan memiliki konten yang lebih optimal untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensi peserta didik. Selain itu, guru juga diberikan keleluasaan dalam memilih berbagai perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, tahap awalnya adalah opsional atau tidak wajib selama periode 2022-2024 sebagai upaya pemulihan pasca pandemi. Di tahun 2024, Kurikulum Merdeka sangat diharapkan sudah terimplementasi dengan skala nasional. Sehingga pada tahun yang sama, sekolah dapat mulai menerapkan Kurikulum Merdeka sesuai dengan kesiapan masing-masing. Jika ada sekolah yang belum siap, mereka masih diperbolehkan menggunakan Kurikulum 2013 atau Kurikulum Darurat.

Pelaksanaan implementasi kurikulum ini melalui beberapa strategi. Strategi pertama kurikulum ini dimulai dari kelas VII yang dimulai pada bulan Juli 2022 agar ketika tahun 2024 sudah *full* dalam implementasi kurikulum ini. Strategi kedua dilaksanakan dengan menyelenggarakan pelatihan kependidikan yang juga dikenal sebagai guru penggerak, selanjutnya strategi ketiga meliputi pengembangan buku siswa dan buku pegangan bagi guru. Strategi keempat melibatkan pengembangan manajemen, kelembagaan, sistem administrasi, dan pengembangan etos sekolah. Strategi kelima adalah pendampingan, seperti melakukan pemantauan dan evaluasi untuk menemukan letak kesulitan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan, dan juga upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

Demi terlaksananya kurikulum baru, sudah seharusnya sekolah mempersiapkan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kurikulum merdeka. Salah satu komponen penting yang dapat menunjang keberhasilan implementasi kurikulum yaitu guru. Sehingga kompetensi

guru perlu dikembangkan mulai dari mengikuti workshop dan sosialisasi mengenai kurikulum merdeka.

Sekolah Menengah Pertama Negeri 137 Jakarta merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan PSP (Program Sekolah Penggerak) dalam implementasi kurikulum merdeka di Jakarta Pusat.penerapan kurikulum merdeka ini telah digunakan sejak tahun ajaran 2022/2023. Hal itu dilakukan karena fasilitas dan faktor lainnya yang mendukung penerapan kurikulum merdeka di sekolah tersebut. Saat ini, SMP Negeri 137 Jakarta telah menerapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum merdeka dan K13. Dua kurikulum diterapkan secara bertahap, dimulai dari kelas VII menggunakan kurikulum merdeka serta kelas VIII & IX masih menggunakan K13.

Proses pembelajaran akan efektif apabila guru memiliki pemahaman yang baik tentang perangkat pembelajaran dan mampu menguasai kelas. Oleh sebab itu, penting bagi guru untuk mengikuti berbagai pelatihan guna mendukung keberhasilan dari penerapan kurikulum merdeka di SMP Negeri 137 Jakarta. Studi kasus tentang "Kesiapan Guru Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (Studi Kasus SMP Negeri 137 Jakarta)" perlu dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut.

B. Pembatasan Masalah

Agar fokus dan tidak terjadi menyimpangnya fokus penelitian, maka amatilah dengan baik tentang batasan-batasan yang perlu disepakati sebagai panduan dalam mencari data dan informasi. Sesuai dengan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka batasan penelitian ini terfokus pada "Kesiapan Guru Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 137 Jakarta."

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan dan pembatasan kondisi yang telah dijelaskan, maka inti perumusan permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana kesiapan guru dalam implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 137 Jakarta?
2. faktor penghambat apa yang terjadi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 137 Jakarta?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meluaskan pemahaman dan memberikan masukan positif dalam proses pengembangan serta implementasi Kurikulum Merdeka di SMP. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan referensi untuk penelitian-penelitian yang dilakukan di masa depan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Dinas Pendidikan

Penelitian ini mampu memberikan informasi yang informatif sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengembangan dan evaluasi penyempurnaan kurikulum untuk mencegah terjadinya masalah di masa depan.

b. Manfaat bagi Sekolah

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan masukan kepada sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

c. Manfaat bagi Guru

Penelitian ini memberikan pemahaman dan kontribusi demi meningkatkan implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 137 Jakarta. Sehingga para guru akan memiliki wawasan lebih dalam teori maupun praktik yang berguna dalam tugas mereka.

d. Manfaat bagi Mahasiswa

Penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan kurikulum, sehingga sebagai calon guru mereka siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Kurikulum Merdeka